

## ANALISIS POTENSI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

### *POTENTIAL ANALYSIS AND ECONOMIC PROJECTIONS LAMPUNG PROVINCE IN 2023*

Miraya Dardanila<sup>1</sup>, Rita Mustika Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Bappeda Provinsi Lampung, <sup>2</sup>Bappeda Provinsi Lampung;  
E-mail : mirayadardanila@gmail.com, ritamustika13@gmail.com;

Dikirim 14 Mei 2023, Direvisi 17 Juni 2023, Disetujui 28 Juli 2023

**Abstrak:** Sebagai upaya peningkatan daya saing daerah khususnya Provinsi Lampung, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran untuk memajukan perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui isu strategis perekonomian Provinsi Lampung, sektor yang potensial mendukung ekonomi Lampung dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023. Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif, pada jenis data menggunakan data sekunder yang berbentuk data gabungan tuntas waktu (*time series*) dari tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian, isu strategis pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi sebagai sektor unggulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung adalah (1) pertanian (2) transportasi dan pergudangan (3) pengadaan air, pengelolaan sampah dan lainnya. Proyeksi ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2023 didominasi oleh (1) pertanian (2) industri pengolahan (3) perdagangan.

**Kata kunci:** potensi ekonomi, proyeksi, pertanian

**Abstract:** *The ways to increase regional competitiveness, especially Lampung Province, then increasing economic growth is what is needed. Economic growth has a role to advance the regional economy. This study aims to determine the economic strategic issues of Lampung Province, sectors that have the potential to support Lampung's economy and the projected economic growth rate of Lampung Province in 2023. This research is in the form of a quantitative descriptive, in the type of data using secondary data in time series from year 2017-2021. The results of the study, the strategic issue of economic growth in Lampung Province is still dominated by the agricultural sector which is vulnerable to fluctuations in commodity prices. While the economic sectors that have the potential to become leading sectors in accelerating the economic growth of Lampung Province are (1) agriculture (2) transportation and warehousing (3) water supply, waste management and others. Lampung Province's economic projections in 2023 are dominated by (1) agriculture (2) processing industry (3) trading.*

**Keywords:** *potency of economy, projection, agriculture*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang

berlangsung terus menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil kajian yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang baik. Pembangunan juga harus dilakukan secara menyeluruh dan tuntas, sehingga sasaran pembangunan yang optimal dapat tercapai (Putri dkk, 2018)

Di sisi lain secara tersirat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memberikan makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan tersebut harus melalui

analisis yang dapat menguraikan potensi-potensi daerah guna menjadi landasan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Otonomi daerah yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Moonti, 2017). Setiap daerah juga didorong untuk meningkatkan daya saing daerah sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah.

Upaya perencanaan pembangunan melalui otonomi daerah dan proses peningkatan daya saing akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi memiliki definisi perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya (Sukirno, 2019). Menurut Boediono (2012), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditekankan pada tiga aspek utama, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang.

Menurut Sukirno (2019), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam sistem produksi suatu negara, yaitu: 1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas

maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. 2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. 3. Luas tanah yang dapat dipergunakan dalam proses produksi. 4. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang penting dalam upaya memajukan perekonomian daerah. Mengingat bahwasanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh potensi yang dimiliki oleh setiap daerah atau lebih dikenal dengan sektor unggulan daerah (Budi dkk, 2020).

Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008).

Pertumbuhan ekonomi juga dapat menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor ekonomi saja. Sektor-sektor dalam pembentuk struktur ekonomi memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait. Struktur ekonomi didefinisikan secara sederhana sebagai komposisi atau

susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Arsyad, 2015).

Provinsi Lampung sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, tema yang diangkat pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah Penguatan Ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan daya saing daerah.

Secara umum, **Struktur ekonomi Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar/eceran.** Besarnya kontribusi ketiga sektor tersebut diharapkan mampu menjadi katalisator dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan *multiplier effect* dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017– 2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	0,97	1,34	0,66	-0,4
B. Pertambangan dan Pengalihan	6,39	2,03	2,7	-3,5	-5,28
C. Industri Pengolahan	6,18	9,04	8,24	-5,25	4,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,43	6,54	9,35	-0,6	-6,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	7,15	3,59	5,29	5,06	6,94
F. Konstruksi	10,96	8,35	6,01	-2,05	6,95
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	6,51	6,87	7,2	-6,64	8,26
H. Transportasi dan Pergudangan	6,6	5,96	8,08	-5,61	2,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,03	10,49	9,1	-5,01	-1,54
J. Informasi dan Komunikasi	10,74	8,14	7,96	8,02	6,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	2,27	2,85	3,76	2
L. Real Estat	5,96	3,5	5,88	-1,73	1,31
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	2,19	3,97	-1,43	1,05
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	4,19	5,84	4,78	4,94	4,21
P. Jasa Pendidikan	5,05	9,09	8,33	4,11	1,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,77	6,29	6,81	10,93	3,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,92	9,32	8,08	-4,59	-2,15
PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengembangkan perekonomian Provinsi Lampung maka perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung juga kemampuan dalam memproyeksikan perekonomian dalam beberapa tahun mendatang. Kajian ini penting untuk dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan ke depan, sehingga tercapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan rakyat "Lampung Berjaya".

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi isu strategis perekonomian Provinsi Lampung?
2. Sektor mana saja yang potensial untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2023?
3. Bagaimana proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi setiap sektor dalam struktur perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2023?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menyajikan isu strategis perekonomian Provinsi Lampung;
2. Menganalisis potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung;
3. Memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di tahun 2023.

## LANDASAN TEORI

Dalam penulisan ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Perencanaan pembangunan ditekankan mengacu pada konsep Tematik Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)<sup>1</sup>, sehingga dalam konteks penulisan laporan ini diharapkan dapat mendukung penyusunan dokumen RKPD yang memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya untuk memecahkan pokok permasalahan dalam pembangunan. Lebih lanjut, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur secara teknis tata cara penyusunan dokumen RKPD.

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai bagian dari *breakdown* target indikator makro pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dicapai setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi dan konsistensi dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Disisi lain, hal

ini memudahkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pembangunan suatu daerah.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah merupakan suatu penyajian analisis indikator makro daerah yang berisi target capaian setiap indikator dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk memperkuat alasan penetapan suatu target, hal ini mengacu pada pendekatan teknokratif dan *top - down* dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan setiap target indikator makro pembangunan dengan tetap mengindahkan kaidah ilmiah yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan target indikator makro daerah yang tercantum dalam kerangka ekonomi makro daerah dengan menggunakan *Financial Programming Policies*, sebagaimana yang telah disosialisasikan oleh direktorat perencanaan makro dan analisis statistik Bappenas RI.

### 1. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neo-klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow. Dalam analisa neo-klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu (Arsyad, 2015).

Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi

<sup>1</sup> Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional

antara pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. (Arsyad, 2015).

Menurut Pratama dkk (2022), pertumbuhan ekonomi melalui sisi permintaan dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat sementara pertumbuhan ekonomi melalui sisi penawaran diakibatkan oleh peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, kapital, perubahan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai literatur dan model empiris yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis pengaruh variabel ekonomi dan non ekonomi terhadap pertumbuhan. Model pertumbuhan dinyatakan dalam bentuk hubungan fungsional antara variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas (*explanatory variable*). Model pertumbuhan neo-klasik mendasarkan analisisnya pada model fungsi produksi Cobb-Douglas (Mankiw dkk, 1992).

$$Y_t : A_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

$Y_t$  = Tingkat pertumbuhan pada tahun  $t$ .

$A_t$  = Tingkat kemajuan teknologi pada tahun  $t$ .

$K_t$  = Jumlah stok modal pada tahun  $t$ .

$L_t$  = Jumlah tenaga kerja pada tahun  $t$ .

$\alpha, \beta$  = Elastisitas Produksi dari input Modal dan Tenaga Kerja.

Model pertumbuhan neo-klasik mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki pengembalian skala konstan (*constan returns to scale*), berlakunya hasil yang semakin menurun pada setiap input (*diminishing returns*) dan elastisitas

positif penggantian antara setiap input. Model struktur dasar fungsi produksi pertumbuhan ekonomi Solow adalah sebagai berikut :

$$Y = F(K, L)$$

Kondisi *constan returns to scale* (pengembalian skala konstan) terhadap output dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = F(K,L) = L \cdot F(K/L, 1) = L \cdot f(k)$$

$K = K/L$  adalah ratio modal pertenaga kerja.

$Y = Y/L$  adalah menunjukkan jumlah output perpekerja.

Selanjutnya dinyatakan bahwa persediaan kapital merupakan determinan tingkat output suatu perekonomian yang dapat berubah sepanjang waktu dan berimplikasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan yang saling berpengaruh terhadap persediaan kapital yaitu investasi ( $i$ ) dan penyusutan ( $\delta$ ). Investasi mengacu pada penambahan peralatan baru sehingga persediaan modal bertambah, sementara penyusutan ( $\delta$ ) mengacu pada penggunaan capital sehingga menyebabkan persediaan kapital menurun. Investasi perpekerja sebagai fungsi dari persediaan kapital perpekerja dinyatakan sebagai berikut :

$$I = s f(k)$$

$$\Delta k = i - \delta k$$

Semakin tinggi jumlah persediaan kapital, maka semakin besar output  $y$ , dan investasi  $i$ , tetapi sebaliknya jumlah penyusutan menjadi semakin besar. Proses ini akan berlangsung terus sampai tingkat penyusutan ( $\delta$ ) sama dengan investasi ( $i$ ).

Jika perekonomian berada pada tingkat persediaan kapital tunggal  $k^*$  (investasi dan penyusutan seimbang) dimana  $\Delta k = 0$ , maka perekonomian berada pada kondisi mapan  $k^*$  (*steady state level of capital*). Perekonomian yang tidak berada dalam keseimbangan akan cenderung menuju kepada kondisi mapan (*steady state level*) yang menunjukkan keseimbangan perekonomian jangka panjang.

Model pertumbuhan neo-klasik jika dilihat dari sudut pandang ekonomi regional adalah bahwa terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah pada negara tersebut. Pada saat proses awal pembangunan tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung meningkat (*divergence*), dan setelah proses pembangunan berjalan lama (jangka panjang) maka perbedaan kemakmuran antar daerah cenderung menurun (*convergence*) (Mankiw dkk, 1992).

## 2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB suatu daerah (Dama dkk, 2016).

Menurut Todaro & Smith (2008) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Untuk dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan digunakan PDRB PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga tetap pada suatu tahun tertentu sebagai dasar/referensi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga tahun berjalan. PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan PDRB, yaitu:

- a) Pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi/sector dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).
- b) Pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.
- c) Pendekatan pendapatan, yaitu jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semua komponen tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

## METODOLOGI

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, pada jenis data menggunakan data sekunder yang berbentuk data gabungan tuntun waktu (*time series*) dari tahun 2017-2021. Data diambil secara tidak langsung, didapatkan dari terbitan

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan berbagai kabupaten dan kota, serta data dari publikasi lainnya.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, berbagai literatur, internet, dan instansi terkait lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha Provinsi Lampung tahun 2017-2021, inflasi dan data lainnya yang relevan dan mendukung.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 1998). Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sederhana, dengan gambar, tabulasi, dan grafik dengan menggunakan bantuan microsoft office excel.

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah adalah analisis *Location Quotient* (LQ), yaitu suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional.

Dengan menggunakan teknik ini, akan diketahui sektor unggulan dan sektor non unggulan. Analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan metode ini untuk menentukan potensi ekonomi suatu daerah, diantaranya Husna dkk, (2013), dan Wicaksono (2011). Formulasi analisis ini sebagai berikut:

$$Y_t = a + bt$$

- (1) Dimana LQ= besarnya kuosien lokasi sektor i,
- (2) Si= PDRB dari sektor i Provinsi Lampung,
- (3) S = PDRB total Provinsi Lampung, Ni= PDRB dari sektor i pada tingkat yang lebih luas (Provinsi Lampung), N = PDRB total pada wilayah yang lebih luas (Provinsi Lampung).

Jika hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan nilai LQ lebih besar daripada 1, maka sektor tersebut termasuk sektor unggulan (basis), yang berarti bahwa sektor tersebut memiliki peran yang penting bagi perekonomian Provinsi Lampung dibandingkan daerah atasnya (Provinsi Lampung).

Selain itu, nilai LQ yang lebih besar dari satu memperlihatkan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan memiliki keunggulan komparatif. Namun apabila nilai LQ lebih kecil daripada 1, berarti sektor tersebut termasuk ke dalam sektor non unggulan (non-basis), yang berarti produksi sektor tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung.

Jika LQ sama dengan 1 maka tingkat spesialisasi Provinsi Lampung sama dengan di tingkat Provinsi Lampung. Produksi komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk kebutuhan daerah setempat. Produksi komoditas tersebut

belum mencukupi kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan dan pemenuhannya didatangkan dari daerah lain.

Dalam merencanakan dan mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi dalam upaya menurunkan kemiskinan dan memperluas penyerapan tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan stabilitas ekonomi daerah, pemerintah daerah didalam penyusunan kerangka ekonomi daerah menyusun asumsi dasar yang digunakan sebagai dasar penetapan suatu target indikator. Asumsi yang digunakan dengan mempertimbangkan capaian rata-rata suatu indikator dalam kurun waktu tertentu, elastisitas pertumbuhan suatu indikator, proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF dan World Bank dan isu-isu strategis perekonomian nasional maupun global.

Sejalan dengan pendekatan pembangunan yang digunakan pemerintah daerah (Bappeda sebagai lembaga/instansi yang memiliki fungsi perencanaan) menggunakan pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Perhitungan proyeksi indikator makro di Provinsi Lampung menggunakan analisis FPP memudahkan untuk melakukan *breakdown* setiap target yang ditelah disepakati bersama antara Bappenas, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Lampung.

*Financial Programming Policies* melakukan proyeksi perhitungan target pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis trend pertumbuhan serta memperhitungkan elastisitas dari setiap indikator, hal ini dimungkinkan untuk tercapainya konsistensi peramalan suatu target indikator dengan tetap mempertimbangkan kinerja indikator sektor lainnya.

Dalam pelaksanaannya, FPP dapat digunakan untuk memproyeksikan kinerja sektor perekonomian dalam 1 (satu) – 5

(lima) tahun mendatang untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung setiap tahunnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Isu Strategis Perekonomian Provinsi Lampung

Dari hasil analisis bebrapa data sekunder dan data pendukung lainnya, beberapa isu strategis perekonomian Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Karakteristik pertumbuhan ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini secara langsung akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 2) Hilirisasi Produk Pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian;
- 3) Pertumbuhan ekonomi Lampung masih rentan dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang utama. Kondisi ini ditunjukkan dari pertumbuhan secara sektoral dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 bukan bersumber dari sektor ekonomi utama melainkan berasal dari sektor Infomasi dan komunikasi sebesar serta belanja jasa kesehatan;
- 4) Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada struktur PDRB sisi pengeluaran mengalami perlambatan pada kurun waktu 2020 – 2021 yang disebabkan oleh merebaknya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada pembatasan aktifitas masyarakat, penurunan daya beli masyarakat dan *refocusing* penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19;

- 5) Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung belum banyak diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan manusia yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif.
- 6) Sangat diperlukan penumbuhan sektor-sektor baru dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung seperti pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan industri;
- 7) Inflasi pangan yang berkejang berasal dari komoditas tertentu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam dan gula;
- 8) Isu strategis bidang penanaman modal antara lain :
  - Kualitas infrastruktur pendukung investasi belum memadai dan belum merata seperti prasarana jalan dan listrik;
  - Konflik hubungan industrial seperti perbedaan pendapat tentang penetapan besarnya upah minimum regional dan penggunaan tenaga kerja dengan sistem *outsourcing*.

## II. Analisis Potensi Ekonomi Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) pada 17 (tujuh belas) sektor yang terdapat dalam perekonomian Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2021, dapat diketahui bahwa dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi besarnya cenderung stabil. Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan besaran nilai *Location Quotient* ada tiga sektor, yaitu pertanian (dalam arti luas), pengadaan air, pengelolaan sampah dan lainnya serta transportasi dan pergudangan.

Tabel 2. Rata-Rata Nilai LQ Sektor Unggulan Provinsi Lampung (2017-2021)

Lapangan Usaha	LQ					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	LQ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,47	2,40	2,33	2,16	2,29	2,33
B. Pertambangan dan Penggalian	0,76	0,80	0,80	0,78	0,79	0,79
C. Industri Pengolahan	0,84	0,85	0,90	0,93	0,93	0,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,16	0,17	0,18	0,17	0,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	1,23	1,25	1,21	1,13	1,19	1,20
F. Konstruksi	0,91	0,95	0,97	0,99	0,99	0,96
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	0,89	0,91	0,93	0,96	0,90	0,92
H. Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,22	1,22	1,44	1,39	1,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45	0,46	0,48	0,54	0,52	0,49
J. Informasi dan Komunikasi	0,87	0,90	0,89	0,81	0,86	0,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,53	0,51	0,47	0,51	0,51
L. Real Estat	1,05	1,07	1,05	1,01	1,02	1,04
M,N. Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	0,93	0,91	0,92	0,90	0,99	0,93
P. Jasa Pendidikan	0,89	0,88	0,91	0,89	0,98	0,91
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,85	0,83	0,74	0,78	0,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,50	0,50	0,49	0,52	0,51	0,50

Dari hasil perhitungan LQ dalam kurun tahun 2017-2021 ada 3 (tiga) sektor unggulan dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi. 3 (tiga) sektor ekonomi yang sangat unggul adalah **pertanian, kehutanan dan perikanan; transportasi dan pergudangan; dan pengadaan air, pengelolaan sampah dan lainnya**. Dalam klasifikasi lapangan usaha yang terdapat dalam PDRB Provinsi Lampung, hanya terdapat tiga sektor yang merupakan sektor unggulan, tetapi bukan berarti 14 (empat belas) sektor lainnya bukan merupakan sektor unggulan, hal ini tergantung pada kabupaten/kota dan kebijakan pembangunan nasional. Sementara itu **sektor Jasa Perusahaan memiliki kontribusi terkecil sebesar 0,08** terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung.

### II.1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki indeks LQ rata-rata terbesar dalam kurun waktu 2017-2021 sebesar 2.33 sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini merupakan sektor

unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung sangat fokus memaksimalkan potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan program unggulan Gubernur Lampung terpilih periode 2019-2024 yang memadupadankan potensi sektor pertanian dengan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja sektor pertanian. Melalui Kartu Petani Berjaya (KPB), petani di kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendapat fasilitasi permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi, pengembangan korporasi petani dan peningkatan kompetensi petani.

Jika di *breakdown* lebih lanjut menggunakan analisis *Location Quotient*, dapat diketahui bahwa dari sub sektor tanaman hortikultura serta kehutanan dan penebangan kayu besaran nilainya mengalami fluktuasi (berubah-ubah) dalam jangka waktu 2017-2021. Sektor yang mengalami fluktuasi tersebut adalah sektor yang dalam kurun waktu tertentu meningkat dan ada besaran nilainya yang cenderung turun. Sub sektor tanaman, perkebunan dan perikanan merupakan sub sektor pertanian yang besaran nilainya cenderung stabil, sedangkan sub sektor yang mengalami peningkatan dalam jangka waktu 2017-2021 adalah sub sektor tanaman pangan dan peternakan.

Dari hasil perhitungan LQ pada sektor pertanian dan sub sektor pertanian yang terdapat dalam perekonomian Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2021 terdapat tiga sub sektor dari sektor pertanian yang sangat potensial yaitu **tanaman pangan, peternakan serta jasa pertanian dan perburuan.**

Tabel 3. Rata-Rata Nilai LQ Sub Sektor Pertanian (2017-2021)

Lapangan Usaha	LQ					rata rata LQ
	2017	2018	2019	2020	2021	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,367	2,300	2,244	2,212	2,074	2,239
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,395	2,358	2,304	2,265	2,208	2,306
a. Tanaman Pangan	3,378	3,356	3,324	3,342	3,484	3,377
b. Tanaman Hortikultura	1,349	1,226	1,152	0,953	0,909	1,118
c. Tanaman Perkebunan	1,796	1,787	1,753	1,723	1,583	1,728
d. Peternakan	2,770	2,797	2,783	2,767	2,812	2,786
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	3,516	3,358	3,305	3,321	3,255	3,351
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,577	0,558	0,536	0,350	0,163	0,437
3. Perikanan	2,730	2,514	2,429	2,450	2,054	2,435

Sumber : Hasil analisis data, 2022

## II.2. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan memiliki indeks LQ rata-rata sebesar 1,30 sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Sarana transportasi merupakan tulang punggung pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi.

Pasca beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang mengembangkan jalur lingkaran barat Sumatera, ikut serta berkontribusi dalam peningkatan kinerja perekonomian di Provinsi Lampung.

## II.3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan lainnya

Selama periode waktu 2017-2021, sektor ini memiliki nilai LQ > 1 dengan nilai indeks rata-rata 1,20. Artinya sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 sektor ini merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan

kompetitif. Kegiatan distribusi air minum di Provinsi Lampung dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau selebihnya air minum yang digunakan masyarakat berasal dari mata air dan sumur, namun dalam perhitungan yang dicakup dalam PDRB hanya yang diproduksi oleh PDAM saja. Sedangkan kegiatan daur ulang sampah dan limbah mencakup kegiatan pemungutan sampah yang bisa didaur ulang, volume sampah yang sangat besar merupakan potensi yang dapat dikelola menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan menerapkan prinsip *green economy*.

### III. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023

Pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Provinsi Lampung mencapai 220,62 triliun rupiah. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 PDRB Provinsi Lampung meningkat hingga mencapai 247 triliun rupiah.

Meninjau PDRB menurut sisi lapangan usaha, perekonomian Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2021 di dominasi oleh 3 sektor utama, yaitu : sektor pertanian (kisaran 28-30 persen); sektor industri pengolahan (kisaran 19-20 persen); dan sektor perdagangan besar dan eceran (kisaran 11 persen); diikuti dengan peran sektor transportasi/perdagangan; sektor pertambangan; dan sektor informasi & komunikasi.

Hasil pengamatan terhadap kecenderungan kontribusi kelompok lapangan usaha pada periode 2017 s.d. 2021, menunjukkan bahwa:

- Kontribusi kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung menurun, dari sekitar 30 persen di tahun 2017 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi sekitar 28 persen di tahun 2021.

- Sepanjang tahun 2017-2021 kontribusi kelompok industri pengolahan berada pada kisaran 19 - 20 persen. Porsi tertinggi lapangan usaha industri pengolahan terjadi di tahun 2019 (sebelum Covid-19) yang sebesar 20 persen. Di tahun 2020 (pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar/PSBB saat pandemi Covid-19) peran lapangan usaha industri pengolahan sedikit menurun menjadi 19,42 persen, dan kembali meningkat menjadi 19,65 persen di tahun 2021 sejalan dengan kebijakan pelonggaran aktifitas di sektor ekonomi.
- Pada pengamatan tahun 2017-2021, kontribusi kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; secara relatif berada pada level 11 persen. Secara historis, kontribusi terbesar tertinggi lapangan usaha ini terjadi di tahun 2019 (sebelum Covid-19) yang sebesar 11,59 persen. Di tahun 2020 (berlakunya PSBB saat pandemi Covid-19) peran lapangan usaha perdagangan sedikit menurun menjadi 11,18 persen, dan kembali meningkat menjadi 11,70 persen di tahun 2021 seiring bergairahnya aktifitas ekonomi pasca pandemi.
- Terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020, telah meningkatkan kontribusi jasa layanan kesehatan di tahun 2020-2021. Demikian pula halnya dengan kontribusi lapangan usaha informasi dan komunikasi, meningkat secara signifikan sejalan dengan banyaknya pola aktifitas masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi secara masif.

Perekonomian Lampung tahun 2021 tercatat meningkat sebesar 2,79 persen, lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi hingga minus 1,67 persen. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan nasional yang didukung oleh perluasan vaksin Covid-19

dan penerapan protokol kesehatan di setiap sektor kehidupan masyarakat. Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 dan tahun 2023 mendatang.

Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan *Financial Programming Policies*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2022 di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 254 – 256 triliun rupiah dengan asumsi laju pertumbuhan diproyeksikan tumbuh sebesar 3 – 4 persen. Sedangkan pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 263 – 268 triliun rupiah, dengan asumsi laju pertumbuhan diproyeksikan tumbuh sebesar 3,5 – 4,5 persen. Secara keseluruhan struktur ekonomi Provinsi Lampung masih didominasi oleh 3 sektor unggulan yaitu pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran.

Dari sisi lapangan usaha, **kinerja sektor pertanian (dalam arti luas) pada tahun 2023 juga diperkirakan tumbuh positif dalam rentang 0,25 persen - 0,66 persen, dengan kontribusi sebesar 28 persen-29 persen pada struktur PDRB Provinsi Lampung.** Hal ini didorong oleh optimisme yang dibangun melalui program unggulan pertanian yaitu Kartu Petani Berjaya, dimana petani peserta akan menerima kemudahan berupa ketersediaan pupuk dan alsintan, fasilitasi permodalan, pendampingan manajemen usaha pertanian, termasuk jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu, serta beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu. Disamping itu, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk unggulan pertanian juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing dan nilai

tambah.

Sektor industri pengolahan diperkirakan mengalami perbaikan seiring pemulihan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang. Pemulihan ekonomi di Tiongkok dan AS berpotensi meningkatkan permintaan produk olahan komoditas ekspor terhadap kedua negara mitra dagang tersebut. **Sektor industri pengolahan sebagai kontributor ke dua dalam struktur ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan akan tumbuh positif dalam rentang 4,46 persen - 10,89 persen pada tahun 2023.** Hal ini didorong oleh pembangunan Bakauheni Harbour City, Rencana Pembangunan Kawasan industri di Provinsi Lampung dan meningkatnya permintaan dari sisi domestik dapat menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan industri pengolahan makanan dan minuman.

**Kinerja sektor perdagangan (besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) pada tahun 2023 juga diperkirakan tumbuh dalam kisaran 6,5 persen - 6,8 persen.** Perkiraan ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi domestik yang secara perlahan membaik, seiring pemulihan daya beli masyarakat dan aktivitas masyarakat didorong program vaksinasi dan stimulus pemerintah. Selain itu, pola adaptasi kebiasaan baru masyarakat serta implementasi CHSE : *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan), dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan) juga dapat mendorong kinerja pariwisata domestik, yang selanjutnya dapat berpotensi menggerakkan pertumbuhan sektor perdagangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tentang identifikasi isu strategis dan potensi ekonomi Provinsi Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Isu strategis perekonomian di Provinsi Lampung meliputi karakteristik pertumbuhan ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, sehingga diperlukan penumbuhan sektor-sektor baru dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, tekanan laju inflasi dari komoditas pertanian tertentu, dan isu-isu urusan penanaman modal.
2. Sektor ekonomi yang berpotensi sebagai sektor unggulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung adalah (1) pertanian (2) transportasi dan pergudangan (3) pengadaan air, pengelolaan sampah dan lainnya.
3. Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan *Financial Programming Policies*, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 – 4,5 persen didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Di sisi lain, struktur ekonomi Provinsi Lampung masih akan didominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu 1) pertanian (2) industri Pengolahan (3) perdagangan

## SARAN

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan Provinsi Lampung diarahkan untuk memprioritaskan sektor sektor unggulan dalam struktur ekonomi yang meliputi sektor pertanian (dalam arti luas), tanpa mengabaikan sektor-sektor lain yang dapat dijadikan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung
2. Dari sisi permintaan, pemerintah daerah dapat mengintervensi pertumbuhan ekonomi melalui:
    - a) Optimalisasi belanja pemerintah (*government spending*) yang diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pelaksanaan event berskala nasional maupun regional atau program pembangunan padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
    - b) Mempertahankan kinerja konsumsi rumah tangga menjaga daya beli masyarakat untuk, menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran distribusi barang dan menjaga ketersediaan barang di pasaran dan meningkatkan konsumsi berbasis digitalisasi.
    - c) Meningkatkan kinerja pembentukan modal tetap bruto melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk mewujudkan Lampung ramah usaha meningkatkan kinerja ekspor melalui hilirisasi produk/komoditas untuk meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri dan mengutamakan impor yang berbasis bahan baku saja.
  3. Dari sisi penawaran, pemerintah daerah dapat mengintervensi pertumbuhan ekonomi melalui:
    - a) Revitalisasi industri pengolahan;
    - b) Hilirisasi produk pertanian;
    - c) Optimalisasi penyaluran KUR sektor pertanian;
    - d) Penguatan kelembagaan dan korporasi petani;
    - e) Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah yang terintegrasi lintas sektoral dan berbagai stakeholder.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIE YKPN. Yogyakarta, hlm 13.
- Boediono. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Budi, A. Asmariadi. B., D.S. Fauzela., E. Adistia (2020). *Struktur Ekonomi Rapuh: Pelajaran yang didapat dari Bumi Dipasena-Lampung*. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* Volume 8 Nomor 3, hlm 193.
- Dama, H.Y., Agnes L.Ch.Lapian & Jacline I. Sumual. (2016). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 Nomor 3, hlm 553.
- Husna, Nailatul dkk. (2013). *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 Nomor 1, hlm 188-196.
- Mankiw, N. Gregory., D. Romer & David N. Neil. (1992). *A Contribution to The Empirics of Economic Growth*. *Quartely Journal Of Economics*, May.
- Moonti, R.M. (2017). *Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 19 Nomor, hlm 26.
- Putri, R., D.Z.Faizah & N. Afifah. (2018). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Matematika Integratif*. Vol 14 Nomor 2, hlm 116.
- Pratama, A.d., I.W. Suparta & A.Ratih (2022). *Bagaimanakah Perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Konvergen atau divergen?*. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* Volume 10 Nomor 1, hlm 71.
- Todaro, M.P & Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan Eonomi* Jilid I. Erlangga
- Sukirno, Sadono. (2019). *Makroekonomi : teori pengantar*. Rajawali Pers. Depok.
- Wicaksono. (2011). *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak*. Universitas Diponegoro : Semarang.

### Internet

[www.lampung.bps.go.id](http://www.lampung.bps.go.id)

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
  5. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, (2017-2021). Lampung Dalam Angka. Provinsi Lampung.

*Halaman Kosong*